

## **Fenomena Populisme di Berbagai Negara dalam Sebuah Perdebatan Demokrasi: Kajian *Systematis Review***

**Edah Jubaedah<sup>1</sup>, Karim Suryadi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia  
e-mail: edahj888@gmail.com

### **Abstrak**

Fenomena kemunculan populisme menuai berbagai pro kontra dari berbagai ahli. Sebagian ahli, menganggap bahwa populisme merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun ada juga sebagian tokoh yang menganggap berbahaya. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah ingin memberikan sebuah deskripsi argumentatif mengenai berbagai fenomena populisme yang terjadi di berbagai negara mulai dari Eropa Barat, Syriza, Amerika Serikat, Amerika Latin, Argentina, Venezuela dan Indonesia. Maka dengan melihat kajian empiris dari perkembangan kemunculan populisme di setiap negara tersebut kita dapat melihat titik diferensiasi dan problematika yang muncul terhadap keberadaan populisme. Sehingga kita tidak memberikan sebuah penilaian kosong tanpa adanya sebuah dalil, fakta, data dan kajian yang lebih komperhensif dalam menilai fenomena populisme. Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian *systematis review* dari 3 data base Google Scholar, SAGE Journal dan Taylor & Francis Online yang menghasilkan 9 artikel sebagai kajian artikel utama. Hasil dari penulisan ini yaitu berbagai fenomena populisme yang terjadi di berbagai negara memiliki ciri dan tujuannya masing. Negara, demokrasi, pluralisme dan populisme merupakan sebuah entitas yang tidak dapat dipisahkan dan akan terus berdampingan sejalan. Populisme yang memberikan dampak bahaya adalah populisme yang menentang aturan demokrasi, sedangkan populisme yang memberikan dampak baik adalah populisme yang memiliki kontribusi dalam representasi dari berbagai entitas masyarakat.

**Kata Kunci:** Fenomena Populisme, Pluralisme, Demokrasi

### **Abstract**

The phenomenon of the emergence of populism reaps various pros and cons from various experts. Some experts think that populism is part of the dynamics of democracy, but there are also some figures who consider it dangerous. The purpose of writing this article is to provide an argumentative description of various populist phenomena that occur in various countries ranging from Western Europe, Syriza, America, Latin America, Argentina, Venezuela and Indonesia. So by looking at the empirical study of the development of the emergence of populism in each of these

countries, we can see the points of differentiation and problems that arise in the existence of populism. So that we do not give an empty assessment without a more comprehensive argument, facts, data and studies in assessing the phenomenon of populism. The writing of this article uses a systematic review method from 3 data bases Google Scholar, SAGE Journal and Taylor & Francis Online which produces 9 articles as the main article review. The result of this paper is that various populism phenomena that occur in various countries have their own characteristics and objectives. The state, democracy, pluralism and populism are entities that cannot be separated and will continue to coexist in line. Populism that has a harmful impact is populism that opposes democratic rules, while populism that has a good impact is populism that has a contribution to the representation of various community entities.

**Keywords:** Populism Phenomenon, Pluralism, Democracy

## **PENDAHULUAN**

Negara tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan urusan pemerintahan. Dalam melangsungkan estafeta kepemimpinan dalam sebuah negara ternyata memiliki cara-cara yang unik, bahkan bisa dengan menggunakan cara yang dramatis dan ekstrem. Salahsatunya muncul dengan menggunakan cara gerakan populis yang didasarkan dari berbagai ciri gerakan populis. Rydgren (2005) menyebutkan bahwasannya munculnya keluarga partai dari partai-partai populis sayap kanan ekstrim di Eropa Barat, karena kerangka utama sayap kanan yang lama menjadi tidak berdaya oleh akibat Perang Dunia Kedua. Maka efek dari Perang Dunia Kedua ini menyebabkan marginalisasi elektoral dengan berusaha menggabungkan xenophobia etnonasionalis berdasarkan doktrin etnopluralisme dengan populisme anti politik. Muller mengatakan bahwasannya keadaan populisme kontemporer bukan hanya anti elitis saja, tetapi juga anti pluraris dan dalam klaim eksklusif atas representasi ini terletak dengan karakter yang sangat tidak demokratis.

Di Eropa saat ini, jenis kecemasan politik ialah mengenai populisme. Hal ini dilihat pada kaum liberal yang menampakkan kekhawatiran tentang kelompok yang semakin tidak liberal dan sering menyamakan populisme dengan nasionalisme atau xenovobia biasa, di sisi lain, ada ahli teori demokrasi serta intelektual di dalam parati seperti Syriza dan Pademos yang prihatin dengan munculnya apa yang mereka lihat sebagai teknorasi liberal atau oligarki langsung. Populisme kemudian dilihat sebagai ancaman terhadap demokrasi atau sebagai potensi korektif untuk mode politik yang entah bagaimana menjadi terlalu jauh dari rakyat. Sebagian orang mungkin memberikan prespektif ini salah atau mungkin harus memberikan litimasi perbedaan antara populisme yang baik dengan populisme yang buruk.

Definisi populisme saat ini menjadi bahan kontroversi di kalangan ilmuwan sosial dan sejarawan. Konsep ini memiliki sejarah internasional kotak-kotak yang berasal dari bagian akhir abad kesembilan belas, eksemplar awalnya sering dikatakan termasuk orang Rusianarodniki dan gerakan agraria AS yang mendirikan Partai Rakyat

dan kemudian mendukung pencalonan presiden tahun 1896 William Jennings Bryan. Berbagai partai abad ke-20 di Amerika Latin, terutama gerakan yang mendukung Juan Perón di Argentina, umumnya dicap sebagai populis. Hari ini, tentu saja, Hugo Chávez dan para penirunya Evo Morales di Bolivia dan Rafael Correa di Ekuador yang umumnya dianggap sebagai populis. Di Eropa, sebaliknya, penunjukan telah diberikan terutama kepada politisi sayap kanan, termasuk mendiang Jörg Haider di Austria dan Jean Marie Le Pen di Prancis. Di Thailand, gerakan yang mendukung perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra sering disebut populis.

Beberapa ahli bersikeras untuk mendefinisikan gerakan populis dalam hal basis dukungan sosial dan ekonomi mereka, sementara yang lain menekankan konten "ideologis" atau "strategi diskursif". Seperti yang terlihat dari daftar di atas, label populis telah diterapkan pada berbagai pemimpin dan gerakan yang sangat beragam, dan beberapa sarjana bahkan mempertanyakan apakah populisme benar-benar merupakan fenomena yang khas atau menyatu sama sekali. "Populisme" dalam Ensiklopedia Demokrasi menyebutkan bahwa populisme adalah sebuah gerakan politik yang menekankan kepentingan, ciri budaya dan perasaan spontan rakyat jelata, sebagai lawan dari elit yang memiliki hak istimewa. Untuk legitimasi, gerakan populis sering menarik mayoritas secara langsung-melalui pertemuan massa, referendum, atau bentuk lain dari demokrasi populer-tanpa banyak memperhatikan checks and balances atau hak-hak minoritas (Torcuato, 1995).

Jelas bahwa populisme mewujudkan visi demokrasi yang tidak terikat pada liberalisme atau konstitusionalisme. Memang benar bahwa para pemimpin populis kontemporer di Amerika Latin, sekali lagi mengikuti contoh Chavez, telah mendorong persetujuan konstitusi baru, tetapi tujuan mereka sebagian besar untuk melemahkan batasan kekuasaan eksekutif yang tertanam dalam konstitusi yang ada. Populisme tetap demokratis dalam arti mayoritas, dalam arti membenarkan dirinya sebagai agen dan perwujudan rakyat secara keseluruhan tidak termasuk, tentu saja, elit yang korup dan istimewa dan agen-agennya. Jika pesan populis dikeluarkan hanya atas nama segmen minoritas warga, pesan itu akan terkuras daya tariknya. Kaum populis menginginkan apa yang mereka anggap sebagai kehendak mayoritas seringkali disalurkan melalui pemimpin populis karismatik untuk menang, dan melakukannya dengan sesedikit mungkin hambatan atau penundaan. Karena alasan ini, mereka memiliki sedikit kesabaran dengan penekanan liberalisme pada kebaikan prosedural dan perlindungan hak-hak individu.

Karena doktrin-doktrin populis menyuarakan oposisi yang keras antara "rakyat" dan elit yang menindas mereka, populis memusuhi orang kaya, mendanai modal, dan perusahaan besar. Contoh dengan cara anti Madison, mereka cenderung mengurangi kelas dan kepentingan ekonomi yang beragam menjadi hanya dua yang kaya dan yang lainnya. Ini mungkin menunjukkan bahwa populis akan mendefinisikan orang secara luas untuk merangkul semua kelompok yang kurang mampu dalam masyarakat tertentu. Namun visi populis tidak melihat dunia hanya dari segi ekonomi, yang selalu menjadi batu sandungan bagi mereka yang berharap untuk membangun koalisi populis multietnis atau multiras. Bahkan, gerakan populis cenderung bermusuhan dengan

budaya, bahasa, agama, dan ras minoritas. Jadi populisme sering disertai dengan “nativisme” dan permusuhan terhadap imigran dan imigrasi. Kaum populis cenderung memandang “rakyat” sebagai pengelompokan yang homogen atau seragam dalam hal budaya maupun ekonomi. Mereka yang berbeda dari mayoritas dalam ciri-ciri budaya dasar lebih biasanya dipandang sebagai musuh rakyat daripada sebagai sekutu potensial.

Godaan populis tentunya menghadirkan ancaman bagi visi demokrasi liberal yang diadvokasikan di Federalis. Pada saat yang sama, dapat dikatakan bahwa pengulangan retorika populis dan bahkan gerakan populis menawarkan koreksi yang berguna terhadap kecenderungan demokrasi liberal untuk bergerak terlalu jauh dari fondasinya dalam kedaulatan rakyat. Gerakan-gerakan semacam itu meningkatkan keterlibatan politik kelompok-kelompok yang sebaliknya cenderung pasif, dan mereka dapat memberikan “panggilan bangun” yang berguna bagi para elit dan pejabat publik yang telah terlalu nyaman dengan hak-hak istimewa mereka, dan terlalu jauh dari keprihatinan opini publik. Singkatnya, mereka dapat membantu mencegah demokrasi liberal dari membesarkan sisi liberal mereka dan mengabaikan sisi demokrasi mereka.

Di luar jajaran Islamis radikal, hampir tidak ada oposisi terang-terangan terhadap kekuasaan mayoritas saat ini, tetapi hal itu tidak dijunjung tinggi seperti aspek-aspek lain dari demokrasi liberal. Hal ini terlihat dari dinamika perdebatan demokratisasi yang berlangsung sejak berakhirnya Perang Dingin. Perdebatan itu telah dibentuk oleh pengenalan Fareed Zakaria tentang istilah “demokrasi tidak liberal” untuk mengkarakterisasi rezim yang sekarang memilih penguasa mereka melalui pemilihan yang cukup bebas dan adil, tetapi tidak memiliki aturan hukum dan perlindungan hak-hak individu dan minoritas.

Sementara banyak kritikus Zakaria membela penyelenggaraan pemilu di negara-negara seperti itu, tidak satu pun dari mereka yang meremehkan pentingnya konstitusionalisme, supremasi hukum, dan hak-hak individu, atau menegaskan bahwa kehendak mayoritas harus mengesampingkan hal-hal ini. Namun, di sisi lain dari argumen tersebut, Zakaria dan yang lainnya telah menyatakan skeptisisme yang mendalam tentang keinginan untuk mengadakan pemilihan di tempat-tempat di mana kontrol liberal terhadap mayoritas tidak dilakukan.

Sementara, di Indonesia kemunculan gerakan populis mendapatkan titik momentum krusial pada tahun 2016 hal ini bisa dilihat pada masa Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2016 sampai dengan masa Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 (Azra, 2021). Berdasarkan penelitian menurut Prayogi (2019) menyebutkan bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2017 kemunculan gerakan populisme Islam ini mulai terbentuk dengan terlihatnya bagaimana isu politik identitas, aksi gerakan bela Islam oleh GNPF MUI dan FPI yang memberikan gambaran fenomena korelasi antara gerakan sosial dengan gerakan populisme Islam (Riadi, 2019; Pratama 2021).

Melihat dari beberapa fenomena gerakan populis di atas, maka disini terlihat bagaimana fenomena perkembangan awal muncul populis yang digunakan dalam berbagai kepentingan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, bahkan kontruksi dalam

pemaknaan populisme dalam hubungan demokrasi sangat memberikan pemaknaan yang cukup luas dan tidak bisa memberikan pemaknaan yang lebih signifikan bagaimana gerakan populis yang dapat membangun demokrasi dan bagaimana gerakan populis yang merusak demokrasi di wilayah umum negara. Karena setiap munculnya fenomena gerakan populis di suatu negara, dapat memberikan dampak yang berbeda pula, hal ini sangat tergantung dari motivasi gerakan populis muncul dengan tujuan yang diinginkannya. Maka dalam hal ini, penting sekali untuk bisa mengkaji bagaimana perkembangan fenomena gerakan populis di berbagai negara dengan corak ketokohan yang kentara dengan unsur gerakan populis agar kita bisa memahami fenomena gerakan populis dalam kehidupan sosial bernegara khususnya dalam ranah demokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan kajian *systematis review* dari berbagai jurnal internasional dan jurnal nasional bereputasi khususnya yang diunduh dari media SAGE Journal, Google Scholar dan Taylor & Francis *Online*. Penelitian dengan metode kajian *systematis review* berdasarkan pendapat menurut Creswell (2014) menyebutkan bahwasannya kajian analisis isi dengan mempelajari isi teks tertulis, artefak gambar maupun rekaman, dalam penulisan artikel ini akan lebih difokuskan pada kajian isi teks tertulis dari artikel jurnal internasional. Pendekatan dengan menggunakan *systematis review* dalam penulisan artikel ini dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi tahap proses pencarian artikel, penetapan kriteria inklusi dan eksekusi studi penelitian.

Pada tahap proses pencarian artikel, peneliti melakukan pencarian artikel dengan menggunakan penelusuran penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan kata kunci *populism and democraton* dari penelitian yang termuat pada SAGE Journal, Google Scholar dan Taylor Francis *Online*. Hasil dari penelusuran artikel jurnal yang paling relevan terkait populisme dan demokrasi menghasilkan 30 artikel secara random dari kedua database Google Scholar dan Taylor Francis *Online*. Setelah 30 artikel tersebut terkumpul, kemudian peneliti melakukan tahap kriteria inklusi dan eksklusi studi penelitian.

Kriteria inklusi yang digunakan dalam proses penggunaan 30 artikel yang telah didapatkan harus memenuhi kriteria berikut ini:

1. Topik pengkajian artikel membahas mengenai gerakan populisme yang berkembang di berbagai negara, hal ini dimaksudkan untuk bisa melakukan pengkajian lebih lanjut topik mengenai awal kemunculan populisme dan perkembangan populisme pada masa kontemporer.
2. Topik mengenai populisme yang disajikan harus berhubungan dengan keberadaan demokrasi pada negara yang yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian, hal ini bertujuan untuk memberikan limitasi pada perkembangan fenomena populisme yang semakin meluas dalam berbagai aspek bidang kehidupan bernegara.

Maka apabila, hasil temuan artikel yang dihasilkan memenuhi dua kriteria di atas, selanjutnya peneliti akan menggunakan sebagai bahan kajian referensi bacaan,

analisis dan sintesis sehingga menemukan kontruksi dari inti kajian dalam penulisan artikel ini yaitu mengenai mengurai berbagai fenomena populisme di berbagai negara dalam hubungannya dengan demokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Bagian hasil penelitian ini akan menyajikan dari artikel yang telah memenuhi kriteria dalam *systematis review* khususnya mengenai berbagai fenomena populisme serta hubungannya dengan pelaksanaan demokrasi pada suatu negara dengan berdasarkan pada studi inti yang dibahas dalam penelitian yang telah dilakukan. Adapun hasil temuan penelusuran artikel tersebut dapat dideskripsikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Temuan Literatur**

Total Temuan Artikel	
Google Scholar	466.000
SAGE Journal	21.714
Taylor & Francis <i>Online</i>	45.390
Artikel yang sesuai kriteria	20
Artikel utama untuk kajian analisis	7

(Dikembang oleh Peneliti dari Data Base Google Scholar, SAGE Journal dan Taylor & Francis Online Journal)

Data temuan artikel pada Tabel 1 menunjukkan bahwa temuan artikel dengan kata kunci *populism* dan *democracation* dari data base Google Scholar sebanyak 466.000 artikel, dari data base SAGE Journal sebanyak 21.714 artikel dan dari data base Taylor & Francis Online didapatkan sebanyak 45.390 buah artikel. Namun setelah diseleksi dengan menggunakan kriteria inklusi sebanyak 20 artikel dan artikel yang dijadikan sebagai kajian analisis utama sebanyak 9 buah artikel. Adapun deskripsi temuan artikel utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table 2. Deskripsi Temuan Artikel Utama**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Plattner (2015)	<i>Populism, pluralism and liberal democracy.</i>	Demokrasi liberal saat ini sangat bergantung pada ketahannya terhadap cara-cara dimana dua sumber utama oposisi internalnya antara populisme dan pluralisme radikal secara inheren bertentangan

			satu sama lain.
2.	Rydgren (2005)	<i>Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the emergence of a new party family.</i>	Kemunculan keluarga partai dari partai-partai populis sayap kanan ekstrim di Eropa Barat. Karena kerangka utama sayap kanan yang lama menjadi tidak berdaya oleh akibat Perang Dunia Kedua, dibutuhkan inovasi dari kerangka utama yang baru dan kuat sebelum kelompok sayap kanan mampu mematahkan marginalisasi elektoral.
3.	Muller (2016)	<i>What is populism?</i>	Populisme bukan hanya anti elitis, tetapi juga anti pluralis dan dalam klaim eksklusif atas representasi ini terletak karakternya yang sangat tidak demokratis.
4.	Kaltwasser (2012)	<i>Populism in Europe and the Americas: Threat or corrective for democracy?.</i>	Manifestasi populisme yang berbeda menawarkan solusi khusus untuk dua dilema demokrasi – masalah batas dan batas pemerintahan sendiri – yang sangat mendesak di Eropa dan Amerika. Meskipun benar bahwa solusi yang ditawarkan oleh kekuatan populis terhadap dilema demokrasi tersebut kontroversial, pertanyaan tentang dampak populisme terhadap demokrasi harus dijawab pertama dan terutama secara empiris daripada berdasarkan argumen normatif dan/atau teoritis
5.	Bonikowski (2018)	Populisme dan Nasionalisme dalam Perspektif Komparatif: Pertukaran Ilmiah.	Populisme tidak secara inheren berhaluan kiri atau kanan, fenomena sayap melainkan bahwa itu selalu digunakan sebagai perangkat pbingakain untuk ideologi lain yang lebih komperhensif dari sosialisme hingga etno-nasionalisme. Dalam kasus populisme eto nasionalisme sasaran fitnah moral tidak hanya sebatas ator, tetapi menyangkut mengenai ras, etnis, agama atau budaya yang dianggap

			sebagai ancaman bagi orang-orang sejati.
6.	Hawkins (2003)	Populisme di Venezuela: Kebangkitan Chavismo	Mode hubungan karismatik antara pemilih dan para pemimpin gerakan (terutama Chavez), dan mendasarkan dirinya pada pengejaran suara yang seolah-olah demokratis untuk melegitimasi klaimnya untuk mewakili 'rakyat' melawan elit korup. Faktanya, Chavismo menyesuaikan konsep populisme ini dengan cara yang sangat mengingatkan pada mode klasik populisme, sejauh Chavez dan para pendukungnya sangat percaya pada retorika populer mereka-mereka dengan tulus berusaha untuk mewakili kehendak populer bersama yang secara khusus mereka anggap berasal dari kelompok termiskin dalam masyarakat
7.	Ferrara (2018)	<i>Can political liberalism help us rescue "the people" from populism?.</i>	Ciri khas populisme antiliberal tetapi bukan antidemokrasi ini adalah penolakan terhadap pluralisme, atau kepercayaan pada intoleransi yang dibenarkan. Contohnya Orbán di Hungaria dan Obrador di Meksiko, juga Berlusconi saat kalah pada 2006, semuanya menantang hasil pemilu meski pada akhirnya tunduk pada legalitas.
8.	Alvares dan Dhalgren	<i>Populism, extremism and media: Mapping an uncertain terrain</i>	Populisme tidak boleh dianggap sebagai penyimpangan demokrasi, melainkan ketegangan yang tak terhindarkan dalam demokrasi membuat populisme menjadi potensi yang selalu ada.
9.	Ardit (2003)	Populisme politik demokrasi atau ditepi	Populisme adalah hasil dari konvergensi dua kekuatan anti status quo, massa yang dirampas yang tersedia untuk mobilisasi dari elit terpelajar yang meningkat dan

			kepuasan kerja dan memikirkan cara untuk berubah. Populisme muncul sebagai akibat dari krisis representasi, sebagai respon terhadap ketidakmampuan atau penolakan elit untukanggapi keprihatinan rakyat.
--	--	--	--

(Dikembang oleh Peneliti dari Data Base Google Scholar, SAGE Journal dan Taylor & Francis Online Journal)

## PEMBAHASAN

Dari hasil beberapa kajian literatur, ditemukan beberapa ahli mendefinisikan mengenai populisme diantaranya Tormey (2018) berpendapat bahwa karakteristik populisme yang paling ditekankan adalah bagaimana hubungan konfliktual antara elit dengan rakyat. Mudde (2007) ada konsesus yang cukup besar definisi inti populisme adalah sebagai bentuk politik yang didasarkan pada sebuah oposisi moral mendasar antara elit yang korup dan berbudi luhur rakyat dengan yang dilihat sebagai satu-satunya sumber kekuatan politik yang sah. Canovan (1990) populisme adalah seruan kepada rakyat terhadap struktur kekuasaan yang mapan, ide dan nilai dominan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada ideologi umum bagaimana mendefinisikan populisme atau daerah pemilihan yang dibatasi secara jelas. Sedangkan Morfit (2016) kaum populis paling sering dilihat lebih menyukai pemimpin yang kuat daripada institusi dan tradisi demokratis. Lebih lanjut, Ardit (2003) menyebutkan bahwa Populisme adalah hasil dari konvergensi dua kekuatan anti status quo, massa yang dirampas yang tersedia untuk mobilisasi dari elit terpelajar yang meningkat dan kepuasan kerja dan memikirkan cara untuk berubah. Populisme muncul sebagai akibat dari krisis representasi, sebagai respon terhadap ketidakmampuan atau penolakan elit untukanggapi keprihatinan rakyat.

Citra pemimpin yang dalam banyak rumusan mewakili bangsa, sangat penting dan peran yang diberikan kepada partai relatif kecil. Beberapa juga dipahami bahwa kepemimpinan populis sebagai orang yang secara simbolis menargetkan penciptaan pada navigasi kekuasaan. Lebih lanjut, fitur utama populisme menurut Norris (2016) menyebutkan bahwasannya populisme adalah penolakan terhadap serangkaian nilai-nilai modern, khususnya yang berhubungan dengan globalisme, multikulturalisme dan pluralisme. Maka, kaum populis ini cenderung melakukan sebuah penolakan terhadap ketidakamanan ekonomi serta kaum populis menilai bahwa kaum populis berasal dari elit global yang dianggap telah merusak kedaulatan rakyat. Meskipun sulit dalam memberikan pemaknaan populisme, namun berdasarkan dari beberapa pengertian para ahli di atas, maka penulis memberikan pemaknaan terhadap populisme yaitu sebagai sebuah gerakan yang akan selalu hadir dalam perjalanan demokrasi dan akan

terus selalu beriringan jika *das sollen* dan *das sein* yang diinginkan antara rakyat dan pemerintah tidak pernah setara (kesenjangan kebutuhan).

Dua dogma yang muncul menjadi kedilemaan dalam populisme menurut Ardit (2003) yaitu pertama, jika melihat fenomena populisme dari sudut pandang sub sistem politik populisme tampaknya menjadi rekan perjalanan mode representasi kontemporer yang ditingkatkan media yang bekerja di negara demokrasi yang sedang berkembang dan yang sudah mapan. Kedua, manifestasi populisme dapat berkembang dalam tatanan demokrasi. Tetapi dalam kondisi ketiga berada pada ancaman bahaya di mana populisme dapat dengan mudah berubah menjadi otoritarianisme. Ini adalah pengingat bahwa fenomena itu bisa menjadi sesuatu yang lebih berbahaya daripada mode representasi atau gangguan, karena juga bisa menandakan ancaman atau gangguan nyata terhadap demokrasi.

Kajian kedua dalam artikel ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan bagaimana fenomena-fenomena populisme yang terjadi di berbagai negara. Demokrasi liberal saat ini bergantung pada ketahuannya terhadap sumber utama opisis internalnya antara populisme dan pluralisme radikal secara inheren bertentangan satu sama lain (Plattner, 2015). Sedangkan menurut Rydgren (2015) menyebutkan bahwasannya populisme sayap kanan tidak akan menyebar jika tidak ada aktor yang memainkan peran. Pada perkembangan dewasa ini, memang sulit untuk mengurai siapa yang populis dan siapa yang tidak populis hari ini. Dalam menganalisis keadaan populisme kontemporer Muller (2016) menyebutkan bahwasannya populisme bukan hanya anti elitis, tetapi juga anti pluralis serta memiliki karakter yang sangat tidak demokratis.

Di Amerika Serikat, kata populisme saat ini sebagian besar diasosiasikan sebagai egaliter politik sayap kiri dalam potensi konflik dengan partai Demokrat yang dimana para kritikus populis telah menjadi sentris. Secara khusus para pembela Main Street melawan Wall Street dari walikota New York City ke senator Elizabeth Warren dan Bernie Sanders dipuji atau dibenci sebagai populis. Hal ini terjadi kontradiktif dengan populisme di Eropa bahwa memiliki pemahaman yang berbeda mengenai liberalisme dan populisme. Di Amerika Utara, liberal berarti kasar atau sosial demokrat. Di Eropa, populisme tidak pernah digabungkan dengan liberalisme, karena di Eropa liberalisme memiliki sebuah pemaknaan bagaimana penghormatan terhadap pluralisme dan pemakanan tentang demokras yang harus melibatkan sifat *check and balances* dan hak minoritas menunda proses pengambilan keputusan dan kompromi politik akan menyebabkan kurangnya ketegasan. Oleh karena itu, populisme pada dasarnya bersifat demokratis. Hal ini diperkuat oleh pendapat Canovan (1981) yang menyatakan bahwa populisme sangat cocok dengan pilar demokrasi, bagaimanapun, populis percaya bahwa kehendak umum harus diungkapkan secara langsung dan tanpa perantara. Dalam penjelasan yang sependapat, Kaltwasser (2012) memandang populisme sebagai sebuah cara menyalurkan ketidakpuasan politik dan menempatkan isu-isu yang diabaikan oleh arus utama partai dalam agenda politik dimana semua gerakan rakyat murni melawan elit yang korup.

Gerakan populis tidak akan berbahaya, jika memiliki implikasi penting. Pertama, populis tidak harus menentang gagasan representasi politik, tetapi mereka dapat melakukan dukungan secara positif. Populis akan baik-baik saja, jika merepresentasikan perwakilan yang tepat, membuat penilaian yang tepat dan memberikan dampak yang dibenarkan. Contoh dalam pemilihan Parlemen Uni Eropa Mei tahun 2014, sebuah partai populis Pademos memenangkan 8% suara, menempati peringkat keempat dalam hasil keseluruhan, meskipun pada saat itu baru berusia 4 bulan. Kemunculan partai sayap kiri yang progresif dan berorientasi demokratis tetapi dengan gaya populis yang jelas dengan sering mencari jalan lain untuk komunikasi politik berbasis media sosial (Alvares dan Dhalgren, 2016). Kedua, sangat penting untuk dipahami mengenai populis bukan sekedar anti elitis tetapi juga anti pluralis. Dalam hal ini, rakyat itu sendiri merupakan entitas terpenting dalam demokrasi. Gagasan Richard Nixon yang terkenal mengenai “mayoritas diam” memberikan pemaknaan bahwa jika politisi populis itu gagal dalam sebuah pemungutan suara pemilihan umum, bukan karena mereka tidak mewakili mayoritas, tetapi karena entitas mayoritas itu belum berani menyuarakan. Maka dengan kata lain, populis tidak selalu berada pada posisi menentang institusi politik, tetapi selama mereka masih berada dalam oposisi mereka selalu memanggil orang-orang termarginalkan di luar lembaga atau bahkan jajak pendapat.

Dalam perkembangan beberapa fenomena populis yang lain ternyata memiliki ciri yang kontradiktif. Ada beberapa perdebatan panjang mengenai populisme dimana apakah populisme sebuah ideologi, strategi atau gaya komunikasi (Mudde 2004; Brubaker 2017) atau merupakan sebuah gambaran umum tentang prespektif yang berbeda (Bonikowski, 2017). Oleh karena itu, populisme dapat membenarkan otoritarianisme dengan menerapkan anti pluralis dan bentuk demokrasi yang tidak liberal. Populisme ditentang karena menyuarakan sebuah ketidakpuasan yang diabaikan oleh arus utama. Bagi Muller (2016) populisme seperti ini adalah racun bagi demokrasi sebab menyamakan bagian dari orang dengan semua orang, serta memberikan titik urgensi pada mereka yang ingin melaksanakan kehendak rakyat yang bereaksi (Freeden, 2017).

Sebagai sebuah contoh dari argumentasi di atas ialah tentang Brexit dan urgensi yang dimiliki politisi berusaha untuk menerapkan dengan cara bentrok untuk menempatkannya di bawah pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif, kondisi ini menjadikan figur otoriter, bukan pada masyarakat yang terbuka (Freeden, 2017). Contoh kedua, pada saat Orbán di Hungaria, Obrador di Meksiko dan juga Berlusconi saat kalah pada pemilihan umum tahun 2006, semuanya menentang hasil pemilihan umum meskipun pada akhirnya tunduk pada legalitas hasil pemilihan umum. Menurut Rousseau, seringkali populisme sebenarnya menggunakan keinginan semua yang tidak sama dengan keinginan umum yang sebenarnya mempertanyakan hasil pemilihan reguler (Muller, 2014). Maka, melakukan sebuah penolakan terhadap beban yang diamanatkan hasil pemilu merupakan sebuah bentuk intoleransi yang dibenarkan oleh kaum populis. Selain daripada itu, yang menyebabkan populis lebih berbahaya adalah munculnya gaya pemerintahan yang terpolarisasi, sehingga kubu-kubu yang

bersebrangan tidak lagi berbenturan dalam kebijakan, nilai politik atau pandangan, tetapi kubu-kubu tersebut saling mempertanyakan status masing-masing sebagai pesaing yang sah dalam arena demokrasi (Privitera, 2012).

Sebagai jalan tengah dalam menghadapi dua dogma yang berbeda mengenai fenomena populisme adalah melihat bagaimana penyebab populisme itu muncul apakah terletak pada pertumbuhan eksponensial ketidaksetaraan di semua ekonomi maupun politik yang maju dan berkembang atau dari kekuatan absolut baru yang dikerahkan oleh elit politik. Sama seperti raja absolut dapat menolak pembuatan undang-undang parlementer, membubarkan atau menyelenggarakan parlemen pikirkan ketegangan antara monarki Stuart dan parlemen Westminster pada abad ke-17 begitu pula pasar saat ini memiliki kekuatan untuk menarik legitimasi dari pemerintahan demokratis dengan memengaruhi kemakmuran di sekitar kontes pemilihan diperjuangkan. Tujuh pemerintah di Eropa telah dijatuhkan oleh tekanan pasar setelah krisis 2008: Portugis 2009.

## SIMPULAN

Dalam beberapa perdebatan fenomena populisme di atas, penulis menempatkan pada penilaian bagaimana keberadaan populis tersebut menjadikan dua wajah yang berbeda, di sisi lain bisa menjadi musuh tetapi di sisi lain bisa menjadi teman demokrasi, hal ini bergantung pada penggunaan jalan arah populisme terhadap jalannya demokrasi, karena populisme yang baik adalah populisme yang menginginkan kesejahteraan rakyat, bukan rakyat sebagai kepentingan dalam mewujudkan kepentingan. Kehadiran populisme mampu sebagai wujud moralistik dari politik, cara memahami dunia politik tempat mana dalam oposisi murni secara moral yang sepenuhnya bersatu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akkerman, A., Mudde, C., & Zaslove, A. 2014. How populist are the people? Measuring populist attitudes in voters. *Comparative political studies*, 47(9), 1324-1353.
- Alvares, C., & Dahlgren, P. 2016. Populism, extremism and media: Mapping an uncertain terrain. *European journal of communication*, 31(1), 46-57.
- Azra, A. 2021. Populisme Islam dan Politik. *Jurnal Peradaban* 1(1), 1-9.
- Bang, H., & Marsh, D. 2018. Populism: a major threat to democracy?. *Policy Studies*, 39(3), 352-363.
- Bonikowski, Bart. 2017. Populisme Etno-Nasionalis dan Mobilisasi Kebencian Kolektif. *Jurnal Sosiologi Inggris* 68 (S1): S181-213.
- Brubaker, R. 2017. Why populism?. *Theory and Society*, 46(5), 357-385.
- Canovan, M. 1999. Trust the people! Populism and the two faces of democracy. *Political studies*, 47(1), 2-16.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Ferrara, A. 2018. Can political liberalism help us rescue "the people" from populism?. *Philosophy & Social Criticism*, 44(4), 463-477.

- Freeden, M. 2017. After the Brexit referendum: revisiting populism as an ideology. *Journal of Political Ideologies*, 22(1), 1-11.
- Moffit, Benyamin. 2016. *Populisme: Performa, Gaya dan Representasi*. Stanford: Stanford Pers Universitas.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (Eds.). 2012. *Populism in Europe and the Americas: Threat or corrective for democracy?*. Cambridge University Press.
- Müller, J. W. 2014. The people must be extracted from within the people. *Constellations*, 21(4), 483-493.
- Müller, J. W. 2015. Parsing populism: Who is and who is not a populist these days?. *Juncture*, 22(2), 80-89
- Müller, J. W. 2016. *What is populism?*. University of Pennsylvania Press.
- Müller, T. S., Hedström, P., Wennberg, K., & Valdez, S. 2014. *Right-wing populism and social distance towards Muslims in Sweden: Results from a nation-wide vignette study*. Linköping University Electronic Press.
- Näsström, S. 2011. Where is the representative turn going?. *European journal of political theory*, 10(4), 501-510.
- Pratama, D. B. 2021. Populisme Islam dalam Gerakan 212. *Saskara-Indonesian Journal of Society Studies*, 1(1), 1-26.
- Plattner, M. F. 2010. Democracy's Past and Future: Populism, Pluralism, and Liberal Democracy. *Journal of Democracy*, 21(1), 81-92.
- Privitera, W. 2012. *Sfera Pubblica dan Democratizzazione*. Milano-Udine: Mimesis, 159-168.
- Riadi, B., & Drajat, D. 2019. Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212. *Holistik*, 3(1), 10-18.
- Rydgren, J. 2005. Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the emergence of a new party family. *European journal of political research*, 44(3), 413-437.
- Tormey, S. 2018. Populism: democracy's Pharmakon?. *Policy studies*, 39(3), 260-273.